

Judul : Menhub pastikan bandara Komodo dikelola lokal
Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 13

Raker Di Senayan

Menhub Pastikan Bandara Komodo Dikelola Lokal

KOMISI V DPR kembali menggelar rapat kerja bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, kemarin.

Rapat membahas transportasi dan infrastruktur penunjang di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Mulai dari Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, Borobudur, dan Likupang.

Dalam raker itu, masalah pengelolaan Bandara Komodo, di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus rapat. Sejumlah anggota dewan mempertanyakan adanya asing dalam pengelolaan Bandara Komodo.

Menanggapi itu, Menteri Budi Karya Sumadi membantah Bandara Komodo dikuasai asing. Menhub menjelaskan, kepemilikan Bandara Komodo 51 persen lokal.

"Lelang Bandara Komodo konotasi dikuasai asing itu sama sekali tidak benar. Saya hormati pendapat bapak ibu mengenai kehati-hatian. Kami akan hati-hati," ungkapnya.

Sekadar info, lelang proyek Bandara Komodo dimenangkan dua perusahaan, PT Cardig Aero Services dan Changi Airports International Pte Ltd. Sesuai aturan, kepemilikan saham dalam konsorsium ini minimal 51 persen sahamnya dimiliki lokal.

"Pada kenyataannya pemegangnya, Cardig yang pegang 80 persen saham, dimiliki Indonesia. Changi hanya 20 persen," urainya.

Kemudian, kata BKS, sapaan Budi Karya, operatornya tetap akan diberikan kepada perusahaan lokal. Lalu navigasi udaranya pun tetap dilakukan AirNav Indonesia.

Menurutnya, Changi akan lebih banyak mengembangkan sisi *land side*, mulai dari terminal dan gedung-gedung di bandara.

Sementara, yang paling

penting investasi yang didapatkan dari Changi. Bekas Dirut PT Angkasa Pura II ini menjelaskan, dengan tambahan Rp 1 triliun investasi dari swasta saja, bisa digunakan untuk tambahan modal pengembangan bandara di tempat lain.

"Yang terpenting adalah apa yang jadi dasar kita, satu tentu investasi. Jadi kalau kita dapat Rp 1 triliun dari swasta, saya pikir cukup lumayan untuk menambah supaya ruang yang dimiliki oleh APBN bisa membangun bandara-bandara di daerah lain," jelasnya.

Genjot Wisata Baru

Menhub juga menjamin pembangunan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional itu akan dilaksanakan dengan fokus yang tinggi dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden.

Menhub menganggarkan dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk mendukung konektivitas di lima kawasan wisata itu.

Dana sebesar itu, di antaranya untuk mendukung peningkatan fasilitas penunjang, menambah jalur rel kereta api, pembangunan pelabuhan hingga kegiatan wisata kapal pesiar.

"Diharapkan memberikan devisa bagi Indonesia di masa mendatang," kata BKS.

Menteri Basuki menambahkan, pembangunan infrastruktur di lima kawasan wisata prioritas itu ditargetkan selesai pada tahun ini.

"Selanjutnya, akan diprioritaskan kembali daerah lain untuk pembangunan infrastrukturnya. Ini bagian dari program pembangunan untuk wisata yang berkelanjutan," jelas Basuki.

Setelah pembangunan infrastrukturnya selesai, menurut Basuki, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendesain sejumlah kegiatan untuk menarik masuk wisatawan. ■ KPJ